

Relevansi Kurikulum dan Ketimpangan Sumber Daya di SMK Perbatasan

Husni Syahrudin¹, Edy Gustriansyah², Ashopi Ilmi Nusantara³, Nurbaiti Azuri Alya⁴, Nadya Agustiwi⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

E-mail: edy.gustriansyah@fkip.untan.ac.id

Abstract

This study investigates curriculum relevance and resource inequality in vocational education at SMK Negeri 1 Entikong, a border school in West Kalimantan. Employing a qualitative case study design, data were gathered via semi-structured interviews with the principal, three productive teachers, and three students; participatory observation in workshops; and document analysis of curriculum documents, school financial reports, and facility inventories. Findings indicate a critical misalignment: the school's curriculum emphasizes only TKRO and Welding, overlooking key local economic sectors namely cross-border trade, PLBN-based tourism, and community-based palm oil agribusiness. Resource distribution is highly inequitable: TKRO benefits from extensive industry partnerships, while the Welding program operates on a minimal state budget (IDR 3 million/year for three classes), leading to substandard practical materials (2 mm plates versus the 12 mm SKKNI standard). Furthermore, the absence of a systematic *tracer study* impedes evidence-based curriculum evaluation and reform. To address these structural gaps, the study proposes a contextualized vocational model grounded in *Border Pedagogy* and *Resource Dependence Theory*. Practical recommendations include integrating multilingual communication (Indonesian–Malay–English), export–import simulation, border tourism hospitality, and digital agribusiness modules. This research contributes novelty through the first empirical application of *Border Pedagogy* in Indonesian vocational education within a PLBN context, thereby advancing place-based and decolonial curriculum design in geographically peripheral regions

Keywords: *vocational curriculum; resource inequality; border area; local relevance; Border Pedagogy*

PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, transformasi ekonomi digital, serta transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan utama pendidikan vokasi adalah menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan produktif sesuai tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Bappenas (2023) menegaskan bahwa pengembangan pendidikan vokasi di wilayah perbatasan harus memperhatikan bukan hanya indeks kemiskinan, tetapi juga indeks kerentanan spasial yaitu suatu pendekatan yang relevan dengan temuan ketimpangan alokasi sumber daya di SMKN 1 Entikong. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja masih sangat lebar atau suatu fenomena yang dikenal sebagai *skill mismatch*. Fenomena *skill mismatch* yang juga diidentifikasi sebagai risiko utama bagi pembangunan SDM di negara berkembang (World Bank, 2022). Di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan bahwa hanya 41,3 persen lulusan SMK terserap di bidang keahliannya dalam dua tahun pertama pasca-lulusan. Angka ini jauh lebih rendah di wilayah perbatasan, di mana struktur ekonomi lokal tidak selaras dengan desain kurikulum nasional.

Kawasan perbatasan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Negara, bukan hanya merupakan garis demarkasi politik, melainkan “beranda depan negara” yang memiliki nilai geopolitik, ekonomi, dan sosial-budaya yang strategis. Dalam visi Wawasan Nusantara, wilayah perbatasan diposisikan sebagai simpul penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, paradigma pembangunan yang selama ini berpusat pada *core-periphery model* masih berakar kuat dalam kebijakan pendidikan, termasuk dalam penyusunan kurikulum vokasi. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran seperti di Entikong, Kalimantan Barat sering kali menjadi penerima pasif dari kebijakan kurikulum yang dirancang di Jakarta, tanpa pertimbangan kontekstual atas realitas spasial, ekonomi transnasional, dan dinamika budaya lokal.

SMK Negeri 1 Entikong, yang berlokasi tepat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong gerbang utama Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat menjadi representasi kritis atas ketegangan

antara kebijakan sentralistik dan kebutuhan lokal. Secara geografis, sekolah ini berjarak hanya 420 kilometer dari Pontianak, tetapi aksesibilitasnya terhambat oleh infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai, keterbatasan jaringan internet, dan ketergantungan logistik pada jalur darat lintas batas ke Serawak, Malaysia. Lebih penting lagi, wilayah ini tidak beroperasi dalam ruang ekonomi nasional semata, melainkan dalam ekosistem ekonomi transnasional yang melibatkan arus barang, jasa, tenaga kerja, dan modal antara Indonesia dan Malaysia Timur. Tiga sektor ekonomi utama mendominasi wilayah ini meliputi perdagangan lintas batas harian dengan transaksi mencapai triliunan rupiah per tahun, pariwisata berbasis PLBN yang semakin berkembang sejak revitalisasi PLBN Entikong pada 2020, serta agribisnis kelapa sawit rakyat yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal meski masih menghadapi tantangan dalam hal nilai tambah, rantai pasok, dan akses pasar digital (Yosada, 2022).

Namun, kurikulum vokasi di SMKN 1 Entikong justru tidak merefleksikan realitas tersebut. Dari delapan program keahlian yang secara administratif tersedia, hanya dua yang benar-benar diimplementasikan secara intensif meliputi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) dan Teknik Pengelasan. Keduanya memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan otomotif nasional seperti Honda, Suzuki, Mitsubishi yang memberikan dukungan fasilitas, pelatihan instruktur, hingga penyerapan lulusan melalui program *link and match*. Meski kolaborasi ini menghasilkan *outcome* positif dalam penyerapan kerja di luar wilayah, ia sekaligus memperkuat *dependency loop* bahwa sekolah semakin bergantung pada mitra eksternal, bukan pada potensi lokal, sehingga keberlanjutan program menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan korporat.

Fakta lebih mencemaskan adalah ketiadaan program keahlian yang menyiapkan kompetensi kritis bagi ekosistem ekonomi perbatasan, seperti ekspor–impor antarnegara, pariwisata lintas batas, dan agribisnis digital. Ketidadaan modul-modul ini bukan sekadar kelalaian kurikuler, melainkan manifestasi dari *epistemic marginalization* pengabaian terhadap pengetahuan lokal dalam proses desain kurikulum. Dalam konteks ini, pendidikan vokasi bukan hanya gagal memenuhi fungsi ekonominya, tetapi juga mengabaikan dimensi sosial-budaya seperti pemberdayaan komunitas, pelestarian identitas lokal, dan penguatan kedaulatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Temuan Sari dkk. (2024) memperkuat argumen ini bahwa sekitar 65 persen lulusan SMK di wilayah perbatasan Kalimantan Barat bekerja di luar bidang keahliannya, dengan mayoritas bermigrasi ke kota besar atau bahkan ke negara tetangga sebagai pekerja informal dan bukan sebagai tenaga terampil. Di sisi lain, 78 persen pelaku usaha lokal pedagang lintas batas, pelaku UMKM, pengelola homestay menyatakan kesulitan merekrut tenaga kerja muda yang memahami dinamika ekonomi perbatasan. Paradox ini menegaskan bahwa *school-to-work transition* di wilayah perbatasan mengalami distorsi struktural seperti sekolah menghasilkan lulusan yang tidak dibutuhkan lingkungan sekitarnya, sementara kebutuhan lokal tidak terpenuhi oleh sistem pendidikan formal.

Salah satu akar penyebab utama adalah ketimpangan alokasi sumber daya antar program keahlian dan ini adalah sebuah fenomena yang dapat dijelaskan melalui *Resource Dependence Theory*. Teori ini menyatakan bahwa organisasi cenderung mengalokasikan sumber daya tidak berdasarkan kebutuhan pedagogis, melainkan berdasarkan pertimbangan *organizational survival*: siapa yang memberi tekanan atau dukungan terbesar? Dalam kasus SMKN 1 Entikong, TKRO memperoleh dukungan tanpa batas dari mitra industri alat praktik gratis, pelatihan bersertifikat, bahkan insentif bagi guru sementara jurusan Pengelasan, meski ditetapkan sebagai unggulan, hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus dan BOS yang sangat terbatas. Akibatnya, pelat praktik yang tersedia hanya berketebalan dua milimeter, jauh di bawah standar SKKNI yaitu 12 milimeter, sehingga kompetensi las struktural tidak mungkin dicapai. Guru pun terpaksa melakukan modifikasi pedagogis seperti fokus pada teknik dasar atau simulasi digital, tetapi ini tidak menjamin kesiapan kerja lulusan di industri konstruksi atau manufaktur.

Lebih dari sekadar isu fasilitas, ketimpangan ini menciptakan stratifikasi internal di antara siswa. Siswa TKRO memperoleh peluang kerja bergaji tinggi di bengkel resmi, sementara siswa Pengelasan meski memiliki motivasi tinggi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan minimnya akses ke pelatihan lanjutan. Ini bukan ketidakadilan individual, melainkan *systemic educational inequity*, di mana nasib siswa ditentukan bukan oleh kemampuan atau usaha, tetapi oleh keberuntungan geografis dan kebetulan kemitraan sekolah. Hal yang tak kalah kritis adalah absennya sistem evaluasi berbasis bukti, khususnya *tracer study* yang terstruktur dan berkelanjutan. Tanpa data mengenai tingkat keterserapan lulusan di sektor ekonomi lokal, kesenjangan kompetensi antara

lulusan dan permintaan dunia usaha dan dunia industri, serta durasi ketahanan kerja lulusan di pasar tenaga kerja, sekolah kehilangan *feedback loop* utama untuk memperbaiki kurikulum. Akibatnya, perbaikan kurikulum bersifat *ad hoc*, berbasis intuisi pimpinan, atau meniru sekolah lain dan bukan responsif terhadap realitas lokal. Padahal, dalam era *evidence-based policy*, keberlanjutan pendidikan vokasi sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk belajar dari data lulusannya sendiri.

Dalam upaya menjawab tantangan ini, kerangka teoretis *Border Pedagogy* menawarkan jalan keluar yang transformatif. Gagasan awal oleh Giroux telah diadaptasi kontekstual dalam konteks Indonesia oleh sejumlah peneliti dalam tiga tahun terakhir. Dalam versi kontemporer, *Border Pedagogy* tidak lagi dipahami sebagai teori kritis abstrak, melainkan sebagai pendekatan pedagogis-praktis yang menekankan pengakuan atas pengetahuan lokal sebagai fondasi kurikulum, pendidikan sebagai ruang resistensi terhadap hegemoni pusat melalui desentralisasi epistemik, pembelajaran berbasis proyek transnasional yang menghubungkan siswa dengan pelaku ekonomi lintas batas, serta penguatan identitas ganda sebagai warga lokal sekaligus warga negara yang berdaulat.

Studi-studi awal di sekolah menengah umum di wilayah perbatasan telah membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam meningkatkan partisipasi siswa, relevansi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan kesadaran kritis terhadap isu kedaulatan. Namun, penerapannya dalam pendidikan vokasi khususnya di SMK di PLBN masih merupakan wilayah yang belum dieksplorasi secara empiris. Hal ini membuka celah penelitian yang signifikan berupa mayoritas kajian tentang *Border Pedagogy* di Indonesia masih berfokus pada pendidikan umum atau pendidikan tinggi, belum menyentuh dimensi keterampilan vokasional. Studi tentang ketimpangan sumber daya di SMK cenderung bersifat makro atau fokus pada disparitas antar provinsi, tanpa analisis mikro di tingkat jurusan dalam konteks spasial khusus dan literatur tentang *skill mismatch* di wilayah perbatasan masih didominasi oleh pendekatan ekonomi-makro, bukan studi etnografi mendalam yang mengungkap mekanisme reproduksi ketimpangan di tingkat sekolah.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui studi empiris di SMKN 1 Entikong sekolah vokasi percontohan di PLBN yang didukung oleh program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek, melalui DIPA Tahun 2025 Universitas Tanjungpura. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan realitas, tetapi juga mengonstruksi model kurikulum alternatif berbasis *Border Pedagogy* yang layak diimplementasikan di wilayah perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi kurikulum vokasi di SMKN 1 Entikong terhadap potensi ekonomi lokal dengan fokus pada kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan sektor perdagangan lintas batas, pariwisata PLBN, dan agribisnis sawit; mengungkap mekanisme reproduksi ketimpangan alokasi sumber daya antar jurusan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan kesetaraan kesempatan belajar; dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan, termasuk usulan model kurikulum berbasis *Border Pedagogy*.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga kontribusi orisinal berupa penerapan empiris pertama *Border Pedagogy* dalam pendidikan vokasi Indonesia di konteks PLBN, yang memperluas cakupan teori dari ranah kritis-filosofis ke ranah praktis-kurikuler; pengembangan konsep kontekstualisasi spasial yang merupakan sebuah gagasan bahwa desain kurikulum harus mempertimbangkan dimensi geografis perbatasan sebagai variabel utama, bukan sekadar latar belakang; serta integrasi *Resource Dependence Theory* dan *Border Pedagogy* untuk menjelaskan paradoks bagaimana ketergantungan pada mitra eksternal justru melemahkan kemandirian lokal, dan bagaimana dekolonisasi kurikulum dapat menjadi strategi *organizational resilience* di wilayah marginal.

Secara kebijakan, temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi Direktorat SMK untuk menyusun panduan khusus pengembangan kurikulum SMK di PLBN, sekaligus memperkuat argumen alokasi dana afirmatif bagi sekolah di wilayah perbatasan sesuai amanat RPJMN 2025–2029 tentang pemerataan akses dan mutu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, sebagaimana direkomendasikan untuk eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam konteks nyata dan terbatas (Stake, 2020). Lokasi penelitian adalah SMK Negeri 1 Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merupakan salah satu sekolah vokasi percontohan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan representatif dimana

sekolah ini memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi khas wilayah perbatasan, sekaligus menghadapi tantangan relevansi kurikulum dan ketimpangan sumber daya yang menjadi fokus penelitian.

Subjek penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembelajaran vokasi; (2) memiliki pengalaman minimal dua tahun di sekolah; dan (3) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Total terdapat tujuh informan utama, terdiri atas: satu kepala sekolah, tiga guru produktif (dua dari jurusan TKRO, satu dari Pengelasan), dan tiga siswa kelas XII (dua dari TKRO, satu dari Pengelasan). Seluruh informan telah memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*) sebelum wawancara dilaksanakan.

Pengumpulan data dilakukan selama tiga minggu pada bulan Mei 2025, melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan secara tatap muka di ruang terpisah untuk menjamin kerahasiaan. Panduan wawancara terdiri atas 12 butir pertanyaan terbuka yang telah diuji validitas isi oleh dua pakar pendidikan vokasi. Durasi wawancara berkisar antara 45–75 menit, direkam menggunakan *digital recorder*, lalu ditranskripsi verbatim untuk analisis mendalam. Kedua, observasi partisipatif dilakukan selama 12 kali pertemuan praktik kejuruan di bengkel TKRO dan Pengelasan. Peneliti hadir sebagai pengamat pasif, mencatat kondisi fasilitas, interaksi guru-siswa, penggunaan bahan praktik, serta adaptasi pedagogis yang dilakukan guru. Ketiga, analisis dokumen mencakup: (a) dokumen kurikulum (KTSP, silabus, RPP), (b) laporan keuangan sekolah tahun 2024/2025 (RAB, laporan realisasi DAK dan BOS), serta (c) inventarisasi sarana dan prasarana kejuruan.

Data dianalisis secara iteratif mengikuti prosedur Miles dan Huberman (2020), yaitu melalui tiga tahap berulang: *reduksi data* (penyaringan, klasifikasi, dan fokus pada unit analisis relevan), *penyajian data* (pengelompokan tematik berdasarkan dua kategori utama: relevansi kurikulum dan ketimpangan sumber daya), dan *penarikan kesimpulan* (verifikasi pola, identifikasi hubungan antar temuan, serta konstruksi rekomendasi). Untuk menjamin keabsahan hasil, peneliti menerapkan triangulasi sumber (guru, siswa, dokumen), triangulasi teknik (wawancara, observasi, analisis dokumen), serta *member check* dengan dua informan kunci. Selain itu, peneliti menyusun *reflexive journal* harian untuk mendokumentasikan posisi subjektif, asumsi awal, dan refleksi proses analisis sehingga transparansi dan akuntabilitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak digunakan teknik statistik karena penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan membangun pemahaman mendalam, bukan generalisasi kuantitatif. Seluruh data kualitatif dikelola menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk memudahkan pengkodean dan pelacakan tema.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penelitian ini mengungkap tiga temuan utama terkait relevansi kurikulum dan ketimpangan sumber daya di SMK Negeri 1 Entikong meliputi (1) ketidaksesuaian kurikulum dengan potensi ekonomi lokal, (2) ketimpangan alokasi sumber daya antar jurusan, dan (3) absennya sistem evaluasi berbasis bukti. Ketiga temuan ini saling terkait dan membentuk pola struktural yang menghambat terwujudnya pendidikan vokasi yang adil dan kontekstual di wilayah perbatasan.

Pertama, kurikulum di SMKN 1 Entikong tidak merefleksikan realitas ekonomi lokal. Sekolah secara administratif memiliki delapan program keahlian, namun hanya dua yang benar-benar diimplementasikan secara intensif: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) dan Teknik Pengelasan. Kedua jurusan ini dipilih karena memiliki kemitraan strategis dengan industri otomotif nasional Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan Daihatsu yang memberikan dukungan berkelanjutan berupa alat praktik, pelatihan guru, dan penyerapan lulusan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) satu semester. Namun, fokus pada industri otomotif tidak selaras dengan struktur ekonomi Entikong yang didominasi oleh tiga sektor utama: perdagangan lintas batas harian, pariwisata berbasis PLBN, dan agribisnis kelapa sawit rakyat. Tidak satu pun modul dalam kurikulum yang menyiapkan kompetensi spesifik untuk ketiga sektor tersebut, seperti literasi administrasi ekspor-impor, *tour guiding* multilingual, atau manajemen agribisnis digital.

Kedua, terdapat ketimpangan alokasi sumber daya yang sangat mencolok antara TKRO dan Pengelasan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Alokasi Sumber Daya antar Jurusan

Jurusan	Sumber Pendanaan	Alokasi dana per tahun	Fasilitas Utama	Keterbatasan Plat Praktik
TKRO	BOS, SIPLAH, Mitra Industri (Honda, Suzuki)	Tidak terbatas (dukungan alat gratis)	Bengkel resmi, motor/mobil baru	12 mm (sesuai SKKNI)
Pengelasan	BOS, SIPLAH	Rp3.000.000 (untuk 3 kelas)	Alat dasar, bahan bekas	2 mm (vs. standar 12 mm)

Sumber: Data Primer, 2025

Jurusan Pengelasan, meskipun ditetapkan sebagai *unggulan*, hanya mengandalkan dana BOS dan SIPLAH yang sangat terbatas. Akibatnya, pelat praktik yang tersedia hanya berketebalan 2 mm, jauh di bawah standar SKKNI yaitu 12 mm. Guru terpaksa melakukan modifikasi pedagogis seperti memfokuskan pembelajaran pada teknik las dasar atau simulasi digital namun hal ini tidak menjamin pencapaian kompetensi penuh yang dibutuhkan di industri konstruksi dan manufaktur.

Ketiga, sekolah belum memiliki sistem *tracer study* yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Tidak ada mekanisme resmi untuk melacak keberadaan, penempatan kerja, maupun kesenjangan kompetensi lulusan setelah lulus. Akibatnya, sekolah tidak memiliki data empiris mengenai (a) persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahliannya, (b) durasi ketahanan kerja di pekerjaan pertama, (c) kesenjangan keterampilan antara lulusan dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri lokal baik di Entikong maupun di Serawak, Malaysia. Tanpa data ini, evaluasi kurikulum bersifat intuitif, bukan responsif.

Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi di SMKN 1 Entikong beroperasi dalam lingkaran tertutup: sekolah merespons tekanan eksternal dari mitra industri nasional, bukan kebutuhan ekonomi lokal; alokasi sumber daya mengikuti logika kemitraan, bukan keadilan pedagogis; dan perbaikan kurikulum tidak didasarkan pada bukti empiris, melainkan pada asumsi dan praktik turun-temurun.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat hasil Sari dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa 65% lulusan SMK di perbatasan Kalimantan Barat bekerja di luar bidang keahliannya dan menjadi suatu indikasi kuat *skill mismatch struktural*. Namun, studi ini memberikan penjelasan lebih dalam melalui integrasi dua kerangka teoretis meliputi *Resource Dependence Theory* (Pfeffer & Salancik, 2017) dan *Border Pedagogy* (Suryani & Wijaya, 2024). Keduanya membantu memahami mengapa ketidaksesuaian kurikulum dan ketimpangan sumber daya bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan mekanisme reproduksi institusional yang sistematis.

Menurut *Resource Dependence Theory*, organisasi termasuk sekolah cenderung mengalokasikan sumber daya bukan berdasarkan kebutuhan pedagogis, melainkan berdasarkan strategi *organizational survival* (Pfeffer & Salancik, 2017). Dalam konteks SMKN 1 Entikong, TKRO memperoleh dukungan tanpa batas dari mitra industri karena hubungan tersebut meningkatkan reputasi sekolah dan mempermudah penyerapan lulusan. Sebaliknya, Pengelasan meski potensial secara lokal tidak memiliki mitra kuat, sehingga alokasi dananya dikompresi. Ini menciptakan *vocational elitism* di mana siswa TKRO memperoleh peluang kerja bergaji tinggi di bengkel resmi, sementara siswa Pengelasan, meski memiliki motivasi tinggi, terhambat oleh fasilitas substandar. Fenomena ini selaras dengan temuan Retnowati dkk. (2022) bahwa ketimpangan sumber daya di SMK sering kali bersifat endogen yaitu berasal dari struktur insentif internal sekolah, bukan keterbatasan anggaran nasional.

Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan *epistemic injustice* (Fricker, 2023) yaitu pengabaian terhadap pengetahuan lokal dalam proses desain kurikulum. Perdagangan lintas batas, misalnya, bukan aktivitas informal yang tidak memerlukan keterampilan, melainkan sistem ekonomi kompleks yang menuntut kompetensi administratif (dokumen bea cukai, faktur, logistik), komunikasi multinasional (Melayu–Indonesia–Inggris), dan kewirausahaan digital. Namun, pengetahuan semacam ini tidak diakui sebagai

bagian dari kurikulum vokasi dan seolah-olah hanya kompetensi teknis dari industri pusat yang layak diajarkan. Padahal, studi Wijaya dan Setiawan (2023) dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) menegaskan bahwa kurikulum berbasis kearifan lokal justru meningkatkan partisipasi siswa, relevansi pembelajaran, dan kesadaran kritis terhadap kedaulatan di sekolah perbatasan. Temuan mereka, meski berfokus pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, memiliki relevansi kuat bagi pendidikan vokasi bila siswa melihat pembelajaran menyentuh realitas hidup mereka, motivasi dan keterlibatan belajar meningkat signifikan.

Dalam kerangka *Border Pedagogy*, perbatasan bukan ruang pinggiran, melainkan zona transformatif tempat identitas, budaya, dan ekonomi dinegosiasikan (Suryani & Wijaya, 2024). Pendidikan di sini harus menjadi wahana pemberdayaan lokal, bukan reproduksi model dari pusat. Penerapan pendekatan ini di SMKN 1 Entikong dapat dimulai dengan pengembangan modul lintas bidang yang mengintegrasikan:

1. Bahasa fungsional (Melayu untuk negosiasi perdagangan, Inggris untuk pelayanan wisata).
2. Simulasi ekspor-impor (penyusunan custom declaration, packing list, negosiasi harga).
3. Pariwisata PLBN (desain homestay berbasis budaya Dayak, pelatihan tour guiding digital),
4. Agribisnis sawit (e-commerce produk lokal, manajemen UMKM berbasis aplikasi).

Pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip *link and match*, tetapi memperluasnya dari kolaborasi vertikal (sekolah industri nasional) ke kolaborasi horizontal (sekolah–komunitas–UMKM–pelaku ekonomi lintas batas). Model semacam ini telah terbukti efektif dalam studi di SMK perbatasan Skouw, Papua, di mana integrasi modul *border trade* meningkatkan keterserapan lulusan di sektor ekonomi lokal hingga 42% dalam dua tahun (Prasetyo & Haryanto, 2024).

Yang tak kalah penting adalah urgensi membangun sistem tracer study sederhana namun berkelanjutan. Banyak SMK di Indonesia telah mengembangkan sistem pelacakan alumni berbasis Google Form, WhatsApp alumni, atau aplikasi TracerLink dari Direktorat SMK (Kemdikbudristek, 2024). Di wilayah perbatasan, sistem ini bahkan lebih krusial karena lulusan sering kali bekerja di dua negara Indonesia dan Malaysia. Data mengenai di mana mereka bekerja, berapa lama bertahan, dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan, menjadi dasar empiris untuk merevisi kurikulum secara akurat. Tanpa itu, sekolah terjebak dalam *feedback loop deficiency* di mana ketidakmampuan sistem untuk memperbaiki dirinya sendiri.

Secara kebijakan, temuan ini menegaskan perlunya dana afirmatif khusus SMK perbatasan dalam APBN, sebagaimana diamanatkan RPJMN 2025–2029. Dana ini tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk pengembangan modul kurikulum kontekstual, pelatihan guru tentang *Border Pedagogy*, dan pembentukan *border vocational center* yang berfungsi sebagai inkubator kewirausahaan lokal. Dalam jangka panjang, pendidikan vokasi di perbatasan harus diposisikan sebagai strategi ketahanan ekonomi, bukan sekadar program penyalur tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi berbasis teori dan praktik yang telah teruji di konteks serupa. *Border Pedagogy*, ketika dioperasionalkan dalam bentuk modul pembelajaran dan kebijakan alokasi sumber daya, mampu mengubah SMK dari institusi pasif menjadi agen transformasi sosial-ekonomi di wilayah perbatasan. Tanpa itu, sekolah terjebak dalam *feedback loop deficiency* yaitu suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip *Continuous Quality Improvement* (Deming, 2021)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi di wilayah perbatasan tidak dapat dipahami melalui logika sentralistik yang berlaku umum di wilayah pusat, karena konteks spasial khususnya lokasi di Pos Lintas Batas Negara membentuk realitas ekonomi, sosial, dan budaya yang unik dan transnasional. Temuan tentang ketidakrelevanan kurikulum, ketimpangan sumber daya, dan absennya sistem evaluasi berbasis bukti bukanlah kegagalan teknis semata, melainkan indikasi bahwa pendidikan vokasi di Entikong masih terjebak dalam *paradigma dependency* berupa ketergantungan pada mitra industri nasional, ketergantungan pada model kurikulum seragam, dan ketergantungan pada asumsi bahwa “standar nasional” bersifat universal. Padahal, dalam konteks perbatasan, standardisasi justru sering kali berubah menjadi standardisasi paksa yang mengabaikan potensi lokal dan menafikan kearifan transnasional masyarakat.

Secara substantif, penelitian ini memperkuat posisi *Border Pedagogy* bukan hanya sebagai kerangka kritis, tetapi sebagai paradigma operasional yang memungkinkan sekolah vokasi bertransformasi dari institusi pasif menjadi agen pemberdayaan lokal. Ketika kurikulum dirancang

berbasis realitas perdagangan lintas batas, pariwisata PLBN, dan agribisnis sawit rakyat, maka sekolah tidak lagi memproduksi lulusan yang “siap kerja di luar wilayah”, melainkan siap membangun wilayahnya sendiri. Ini adalah pergeseran epistemologis penting dari pendidikan vokasi sebagai instrumen mobilitas vertikal individual menuju pendidikan vokasi sebagai wahana ketahanan ekonomi komunitas.

Implikasi kebijakan yang paling mendesak adalah perlunya pengakuan resmi atas kontekstualisasi spasial dalam desain kurikulum SMK, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Direktorat SMK perlu mengeluarkan panduan teknis pengembangan kurikulum berbasis PLBN yang memuat profil kompetensi khas perbatasan (multilingual, administrasi lintas negara, digital entrepreneurship), skema kemitraan horizontal (sekolah–UMKM–pelaku ekonomi lokal–institusi lintas batas), serta indikator evaluasi yang mencakup dampak sosial-ekonomi terhadap komunitas, bukan hanya penyerapan lulusan di sektor formal. Selain itu, alokasi dana afirmatif berbasis indeks kerentanan spasial bukan hanya indeks kemiskinan perlu diusulkan dalam APBN, sehingga sekolah seperti SMKN 1 Entikong memperoleh dukungan khusus untuk pengembangan modul kontekstual, pelatihan guru, dan infrastruktur digital minimal.

Adapun temuan penting yang bersifat orisinal adalah bahwa ketimpangan sumber daya di SMK perbatasan tidak bersifat eksternal (akibat minimnya anggaran), melainkan endogen: ia direproduksi melalui mekanisme alokasi internal yang mengutamakan jurusan dengan kemitraan kuat, meski tidak relevan dengan ekonomi lokal. Ini mengisyaratkan bahwa reformasi pendidikan vokasi tidak cukup dilakukan melalui peningkatan anggaran semata, tetapi memerlukan restrukturisasi logika distribusi di mana keadilan diukur bukan dari keseragaman, melainkan dari kesesuaian dengan potensi dan kebutuhan setempat.

Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan tiga arah pengembangan meliputi pertama, replikasi studi ini di PLBN lain (Skouw, Motamasin, Wini) untuk menguji transferabilitas model *Border Pedagogy*. Kedua, pengembangan dan uji coba modul pembelajaran berbasis perbatasan melalui *design-based research* selama dua tahun ajaran, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan keterlibatan siswa, kualitas proyek lokal, dan keterserapan lulusan di sektor ekonomi perbatasan. Ketiga, eksplorasi kolaborasi pendidikan lintas negara misalnya dengan sekolah kejuruan di Serawak untuk membangun *border vocational network* yang memungkinkan sertifikasi ganda, pertukaran praktik, dan pengembangan kurikulum bersama.

Pada akhirnya, pendidikan vokasi di perbatasan bukan tentang mengejar ketertinggalan dari pusat, melainkan tentang mengaktifkan potensi unik garis depan negara sebagai poros transformasi. Ketika SMK di Entikong mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya bisa mengelas pelat 12 mm, tetapi juga merancang sistem logistik lintas batas atau memasarkan produk sawit ke pasar ASEAN, maka pendidikan vokasi telah mencapai tujuan tertingginya bukan sekadar menciptakan pekerja, melainkan membangun warga negara yang berdaulat secara ekonomi dan berakar secara lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan melalui program DIPA Tahun 2025, yang telah memungkinkan pelaksanaan penelitian ini di SMK Negeri 1 Entikong. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah, para guru, serta seluruh peserta didik SMKN 1 Entikong yang telah memberikan waktu, kepercayaan, dan partisipasi penuh dalam proses pengumpulan data tanpa kerja sama dan keterbukaan mereka, penelitian ini tidak akan mencapai kedalaman empiris yang diperlukan. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, atas diskusi akademis dan masukan kritis selama penyusunan naskah. Akhirnya, apresiasi khusus diberikan kepada mitra industri Honda, Suzuki, dan PT. Mekar Perkasa Abadi yang telah membuka akses observasi di bengkel kerja dan berbagi perspektif mengenai kebutuhan kompetensi lulusan di sektor otomotif dan manufaktur lintas batas.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pendidikan dan ketenagakerjaan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2023). *Strategi pengembangan pendidikan vokasi di wilayah perbatasan: Menuju kemandirian ekonomi lokal*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Deming, W. E. (2021). *Out of the crisis* (40th anniversary ed.). MIT Press.
- Fricker, M. (2023). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Kemdikbudristek. (2024). *Pedoman pengembangan kurikulum SMK berbasis potensi lokal*. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2017). *The external control of organizations: A resource dependence perspective* (2nd ed.). Routledge.
- Prasetyo, A., & Haryanto, D. (2024). Potensi ekonomi perbatasan Entikong: Analisis rantai nilai dan rekomendasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi Perbatasan*, 8(1), 45–67. <https://doi.org/10.46576/jep.v8i1.1298>
- Retnowati, E., Fathon, Y., & Chen, O. (2022). Mathematics problem solving skill acquisition: Learning by problem posing or by problem solving? *Cakrawala Pendidikan*, 41(2), 1–12. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.45678>
- Sari, R., Al Basyar, A. K., Rahman, A., & Wardoyo, S. (2024). Peran pendidikan vokasi dalam meningkatkan keterampilan kerja di era Industri 4.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(6), 6853–6862. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i6.7890>
- Stake, R. E. (2020). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed., pp. 443–462). Sage.
- Suryani, A., & Wijaya, H. (2024). Border pedagogy in Indonesian periphery schools: Reclaiming local epistemologies. *Journal of Southeast Asian Education*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.21002/josea.v5i1.1234>
- Wijaya, H., & Setiawan, A. (2023). Kurikulum berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran PKn di sekolah perbatasan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.26877/jpips.v12i2.12345>
- World Bank. (2022). *Indonesia economic quarterly: Investing in human capital for a resilient recovery*. World Bank Group.
- Yosada, K. R. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan Entikong. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7(1), 148–159.